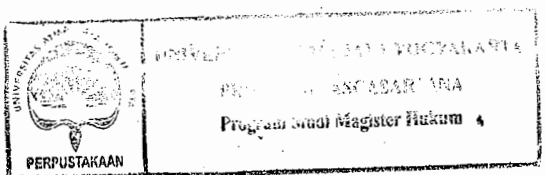




UNIVERSITAS MITRA
PERPUSTAKAAN

Diterima	01 AUG 2008
Inventarisasi	: 106/MIH/Hd.8/2008
Klasifikasi	: 346.07 Ris 08
Subyek	: Commercial law



TESIS

PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP

PERATURAN DAERAH BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH YANG BERMASALAH



Disusun oleh :

Rischa Octavia Wisnu Wardana (061130)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2008



UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Rischa Octavia Wisnu Wardana**
Nomor Mahasiswa : **06.1130/PS/MIH**
Konsentrasi : **Hukum Bisnis**
Judul Tesis : **Pengawasan dan Tindakan Hukum terhadap
Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Yang
Bermasalah**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Gunarto Suhardi, SH

10 April 2008

Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum

10 April 2008

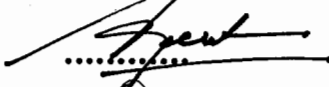

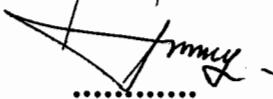


UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

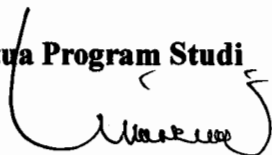
PENGESAHAN TESIS

Nama : Rischa Octavia Wisnu Wardana
Nomor Mahasiswa : 06.1130/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Pengawasan dan Tindakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Yang Bermasalah

Nama Penguji

(Ketua)	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Gunarto Suhardi, SH	8 Mei 2008	
(Sekretaris)		
Y. Sri Pudyatmoko, SH. M.Hum	8 Mei 2008	
(Anggota)		
Sumyar, SH. M.Hum	8 Mei 2008	

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Endang Sumiarni SH. M.Hum

KEASLIAN PENELITIAN

Sejauh yang penulis ketahui berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2007 belum ada yang menulis penelitian mengenai “Pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang bermasalah”. Namun apabila ada penelitian dengan permasalahan yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap bagi penelitian sebelumnya. Kekhususan dari penelitian ini adalah mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mengenai peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak.

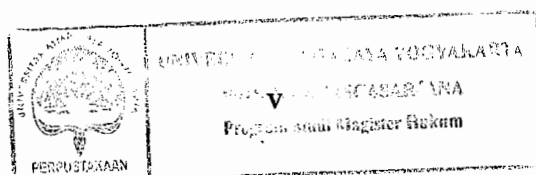
INTISARI

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah yang bermasalah dan bagaimanakah peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sumber hukum sekunder sebagai bahan hukum primer.

Hasil dari penelitian adalah pengawasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan Pengawasan Represif dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan Peraturan Daerah dapat diminimalisir. Peluang pemerintah daerah dalam memperluas pungutan pajak dan retribusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat dan pengusaha.

Kata-kata kunci : otonomi daerah, pengawasan, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.



ABSTRACT

The Law of Governance of Number Area 32 Year 2004 giving opportunity to area to execute the area autonomy extensive of the mentioned intended area to can improve the society prosperity, public service, and make-up of Original Earnings of Area. In the case of observation of Number Law 32 Year 2004 using observation

This problems from this research is what will be observation and action punish to by law which is a period to and what will be opportunity of local government conducting ekstensification of area Iease. This research is research normatif law which using of law source data the sekunder upon which law the primary

This result from research is Represif and Evaluate to by Law and Regional Leader Decision. With the existence of Evaluation to By Law and Decision of Regional Leader of possibility of the happening of mistake in making by Law earn the minimalize. Opportunity of local government in extending imposition and retribution may not unconstitutional the Number 34 year 2000 about Iease and Area Retribution. Others may not cause the high expense economics for society and entrepreneur.

Keywwords : autonomy extensive, decision, extending imposition and retribution

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan tesis “Pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang bermasalah”

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Gunarto SH dan Bapak Y Sri Pudyatmoko SH, M Humo selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dorongan sepenuhnya dalam penyusunan tesis.
2. Terimakasih juga kuucapkan kepada kedua orang tua ku yang telah memberikan sport baik moril maupun material serta bimbingan dan doanya yang selalu menyertaiku.
3. Buat kakakku terima kasih atas Saran dan Dukungannya, kau menjadi Inspirasi hidupku, Jalan masih panjang Maju terus jangan Putus asa, Doa ku selalu untukmu.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan buat Dian Sabrina yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis.
5. Teman-teman kostku membantu dalam menyelesaikan tesis.

Semoga amalan baik Beliau tersebut mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 13 Mei 2008

Penyusun

Rischa Octavia Wisnu Wardana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Pengawasan Peraturan Daerah.....	17
B. Pengertian Pajak Daerah.....	25
C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan.....	35
C. Jenis dan Cara Memperoleh Data.....	
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Yang Bermasalah.....	43
a. Arti Pengawasan dan Jenis Pengawasan Yang Digunakan Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.....	43
b. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Yang Bermasalah.....	49
B. Peluang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Ekstensifikasi Pajak	68
a. Pro dan Kontra Peluang Pemerintah Daerah dalam melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah.....	68
b. Ekstensifikasi Pajak dilihat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.....	83
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	49
Tabel 2	51
Tabel 3	54
Tabel 4	70

